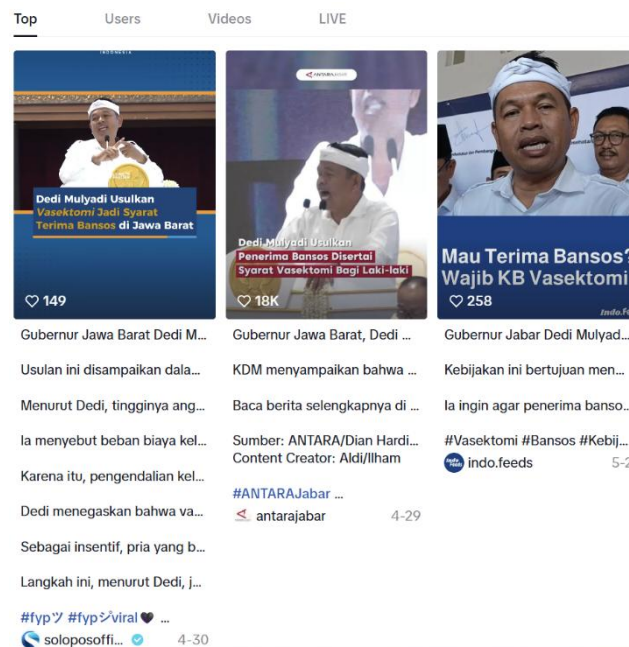


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laju pertumbuhan penduduk yang bertambah dengan cepat sering kali menjadi permasalahan demografis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hasil sensus penduduk (SP) pada Juni 2024, menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,11 persen per tahun (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan atau tantangan sosial, seperti meningkatnya beban ekonomi negara, tingginya angka pengangguran, hingga memburuknya kualitas lingkungan.



**Gambar 1 1** Konten pernyataan Dedi Mulyadi mengenai Vasektomi  
(Sumber: Dokumentasi Penulis)

Hambatan semakin kompleks ketika terdapat wacana kebijakan baru untuk menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk. Dedi Mulyadi, selaku Gubernur Jawa Barat, mengambil tindakan proaktif dengan mengusulkan bahwa vasektomi seharusnya menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial. Vasektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma pada pria. Vasektomi dilakukan dengan tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu ejakulasi cairan mani tidak lagi mengandung sperma (Lukianah & Trilaksana, 2017). Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial secara merata, efektif, dan tepat sasaran.

Program Keluarga Berencana (KB) dengan slogan “dua anak cukup” yang telah lama diberlakukan pemerintah Indonesia, ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi tingginya angka kelahiran. Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah terus berupaya mencari solusi efektif, salah satunya dengan memberikan edukasi program KB vasektomi yang dapat melibatkan partisipasi laki-laki. Namun, akibat rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap vasektomi, menjadikan hal tersebut sebagai hambatan pada pelaksanaannya. Stigma negatif yang masih melekat terhadap tindakan vasektomi serta pengaruh faktor budaya yang menganggap kontrasepsi sebagai tanggung jawab perempuan turut memengaruhi pandangan atas vasektomi.

Secara normatif peraturan mengenai pengendalian penduduk di Provinsi Jawa Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 170 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat. Namun, belum terdapat peraturan daerah yang secara eksplisit mengatur vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial. Meskipun demikian, wacana kebijakan mengenai vasektomi sebagai syarat bantuan sosial telah memicu berbagai implikasi sosial di tengah masyarakat. Wacana kebijakan tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi ketika Rapat Koordinasi Gawe Rancage yang diselenggarakan di Balai Pusdai Kota Bandung pada 28 April 2025. Dedi Mulyadi menyampaikan kalimat, *“saya selalu menuntut orang yang saya bantu supaya KB dulu, dan yang harus hari ini dikejar yang ikut KB harus laki-laki.”*, dalam pidatonya.

Dalam fenomena ini, wacana kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya polarisasi pendapat di kalangan masyarakat. Pernyataan yang seharusnya dapat menjadi solusi atas tantangan pertumbuhan penduduk, justru beralih menjadi perdebatan sengit. Pihak kontra menganggap bahwa kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan vasektomi dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap masyarakat miskin yang dipaksa memilih antara kebutuhan ekonomi dengan hak reproduksi mereka.



**Gambar 1 2 Berita Pernyataan Vasektomi Haram oleh MUI**  
 (Sumber: dokumentasi penulis)

Perdebatan mengenai wacana vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial semakin memanas setelah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan bahwa vasektomi haram jika dilakukan dengan tujuan pemandulan permanen, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat (Sadam/Azhar, 2025). Adanya intervensi dari Fatwa MUI menjadikan perdebatan polemik semakin luas, tidak hanya terbatas pada sudut pandang HAM dan kesehatan, melainkan juga menyentuh aspek agama. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang mempertanyakan tanggung jawab pemerintah atas masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Beberapa pihak menganggap bahwa syarat vasektomi untuk menerima bantuan sosial dapat menghalangi akses masyarakat miskin terhadap bantuan yang seharusnya mereka terima.

Di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang mendukung wacana kebijakan ini dengan berbagai argumentasi yang rasional. Pihak pro terhadap wacana kebijakan ini berargumen bahwa, hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan yang dalam beberapa kasus dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendistribusikan bantuan pemerintah secara merata dan tepat sasaran. Bantuan yang disalurkan secara merata dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

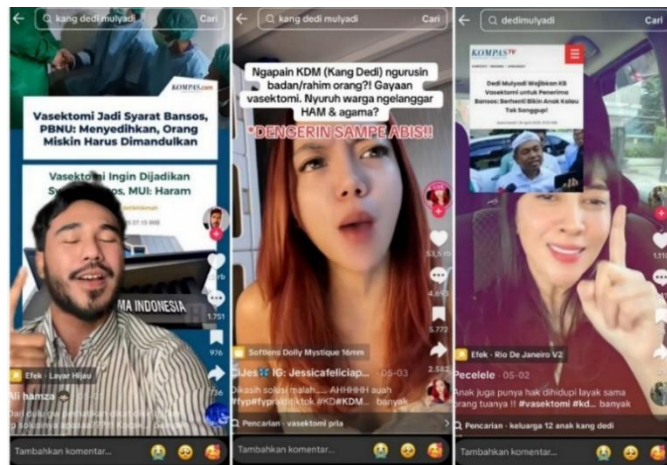
Dalam konteks kebijakan publik, pengaitan antara tindakan medis berupa vasektomi dengan akses terhadap bantuan sosial menunjukkan adanya pergeseran makna reproduksi. Reproduksi yang seharusnya berada dalam ranah privasi sebagai hak atas tubuh individu, kini mulai diposisikan menjadi syarat administratif dalam kebijakan negara. Kondisi ini menempatkan tubuh laki-laki sebagai objek regulasi untuk mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, hal ini juga dapat memunculkan anggapan bahwa masyarakat miskin dipaksa memilih antara hak tubuh atau menerima bantuan untuk keberlangsungan hidup.

Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk komodifikasi reproduksi. Marx dalam karyanya yang berjudul “Das Kapital”, menjelaskan bahwa komodifikasi merupakan tindakan mereduksi sesuatu yang sebelumnya memiliki nilai guna (*use value*) diubah menjadi nilai tukar (*exchange value*). Dalam konteks ini, vasektomi tidak hanya dimaknai sebagai metode kontrasepsi, melainkan sebagai “alat tukar” dalam program bantuan sosial. Sebuah kontrol yang secara otomatis melibatkan persoalan reproduksi. Dengan demikian, komodifikasi

reproduksi pada penelitian ini dapat dipahami sebagai proses ketika hak reproduksi tidak lagi dianggap sebagai urusan privat dan biologis, melainkan dikonstruksikan sebagai objek pertukaran dalam mengakses bantuan sosial.

Usulan wacana kebijakan yang mengaitkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial juga tereskpresikan dalam TikTok, sehingga memicu terjadinya perdebatan di tengah masyarakat. TikTok telah mengambil alih ruang digital dan menjadikannya sebagai media populer untuk menyebarkan informasi secara cepat. Selain itu, TikTok kini juga berkembang menjadi ruang diskusi publik secara digital, wadah dari berbagai pandangan, opini, serta pengalaman dipertemukan.

Hadirnya para konten kreator turut membawa pengaruh besar dalam menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus mempertemukan berbagai narasi yang berkembang terkait wacana kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan konten kreator memiliki pengikut dalam jumlah cukup banyak, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keiistimewaan untuk mempengaruhi atau bahkan mengubah opini publik. Selain itu, peran algoritma TikTok juga turut berkontribusi dalam menampilkan konten-konten yang bersifat menarik secara intens, sehingga dapat memperpanjang durasi paparan pengguna TikTok terhadap wacana kebijakan yang sedang diperdebatkan.

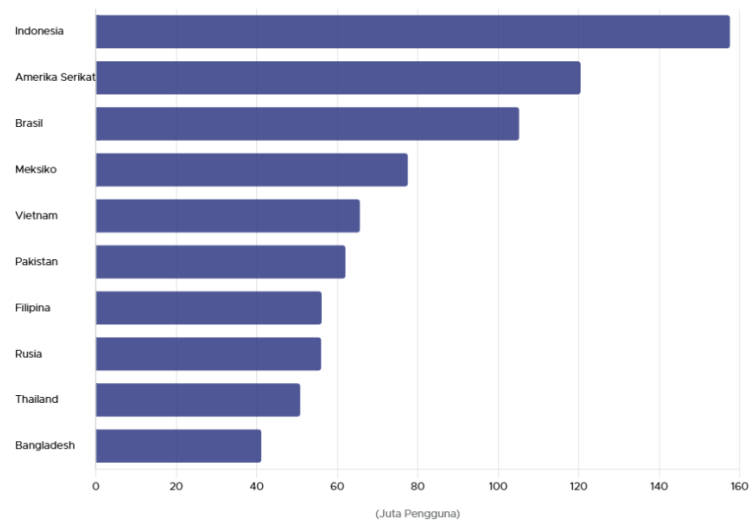


**Gambar 1 3 Konten Tanggapan Masyarakat di TikTok**  
(Sumber: dokumentasi penulis)

Terdapat beberapa konten kreator TikTok yang menyatakan tanggapan positif terhadap kebijakan vasektomi, karena dapat membantu mengurangi jumlah anak terlantar akibat ketidak mampuan orang tua dalam merawat anak. Hal ini dikarenakan faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka (Rahakbauw, 2016). Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwasanya komunikasi digital dapat mengubah diskusi lokal menjadi isu nasional dalam waktu singkat dengan perantara media sosial TikTok.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan media sosial sebagai elemen tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Era digital yang ditandai dengan penetrasi teknologi ini tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, melainkan juga mengubah pola interaksi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Wahabi & Febriana, 2022). Selain menjadi *platform* hiburan, kini media sosial telah berevolusi menjadi ruang diskusi publik yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini dan persepsi publik secara fundamental. *Platform* seperti

Facebook, Instagram, X, dan khususnya TikTok menjadi media efektif dalam menyebarkan informasi, bahkan isu-isu sosial dengan cepat. Di antara berbagai *platform* tersebut, TikTok mengalami pertumbuhan sangat signifikan dan menjadikannya media sosial populer di dunia.



**Gambar 1 4 Statistik 10 Negara Pengguna TikTok Terbesar**  
(Sumber: DataReportal dalam data.goodstats.id)

Berdasarkan Data Reportal yang diambil dari data.goodstats.id, Indonesia memiliki jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia, yakni mencapai 157,6 juta pada Juli 2024. Format konten video pendek yang ditawarkan TikTok membuat penyajian informasi menjadi lebih menarik dan cepat menyebar, sehingga kerap memicu viralitas dalam hitungan jam. Kemampuan algoritma TikTok dalam menyebarkan informasi yang secara cepat, menjadikan TikTok sebagai media efektif untuk mengangkat isu-isu sosial ke ruang publik. Namun, kecepatan tersebut sering kali tidak sejalan dengan akurasi informasi, yang dapat berpotensi menciptakan interpretasi dan persepsi yang beragam di tengah masyarakat.



Persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan maupun penerimaan seseorang terhadap suatu informasi, pesan, objek, pengalaman, ataupun objek (Hakim et al., 2023). Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu akan menerima stimulus atau rangsangan berupa informasi, peristiwa, atau hal lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar. Proses pemberian makna pada stimulus atau rangsangan tersebut yang kemudian disebut dengan persepsi. Menurut (Simbolon, 2008) bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh dua unsur, yakni unsur dari lingkungan dan juga unsur dari diri sendiri.

Data dari IDN Times juga menunjukkan bahwa dari setiap 25 bayi yang dilahirkan per menitnya, 13 diantaranya terlahir dalam keluarga miskin. Berdasarkan data-data yang diperoleh, kondisi tersebut menjadi permasalahan demografis yang dinilai serius. Menurut (Juardi et al., 2023), menjelaskan bahwa terdapat pengaruh langsung antara penambahan jumlah penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pada lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah melakukan upaya untuk mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk mengenalkan berbagai metode kontrasepsi seperti vasektomi. Hal ini dikarenakan partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana (KB) dinilai penting untuk keseimbangan tanggung jawab dan peran

dalam reproduksi, sebagai implementasi dari kesetaraan gender (Lukianah & Trilaksana, 2017).

Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Afrita Ayu Rizkitama dan Fitri Indrawati (2015) dengan judul Hubungan Pengetahuan, Persepsi, Sosial Budaya Dengan Peran Aktif Pria dalam Vasektomi di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2011-2012 yang telah membahas mengenai hubungan antara pengetahuan, persepsi, dan sosial budaya dengan peran aktif pria dalam program vasektomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara persepsi serta sosial budaya dengan partisipasi pria dalam program vasektomi. Namun, tingginya tingkat pengetahuan mengenai vasektomi tidak memengaruhi partisipasi pria dalam keterlibatannya dengan program vasektomi.

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Ermelinda Septiani Flaviana Bira, Veki Edizon Tuhana, dan Roky Konstantin Ara (2024) yang berjudul Persepsi Pria Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana (KB). Pada penelitian ini membahas mengenai persepsi pria pada penggunaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) beserta motif yang mempengaruhi persepsi pria pada penggunaan alat kontrasepsi. Adapun hasilnya adalah pengetahuan dan pengalaman pria memiliki peran penting dalam memengaruhi mereka terhadap penggunaan KB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pasangan Usia Subur di Jawa Barat memaknai komodifikasi reproduksi melalui persepsi Pasangan Usia Subur terhadap pro dan kontra wacana kebijakan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial di TikTok. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada sikap penerimaan atau penolakan,

tetapi juga mengetahui bagaimana hak reproduksi dan kebijakan publik dipersepsikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan sebuah permasalahan yang akan dibahas, yaitu: “Bagaimana persepsi Pasangan Usia Subur (PUS) di Jawa Barat terhadap pro dan kontra rancangan kebijakan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial di TikTok?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengguna TikTok dalam kategori Pasangan Usia Subur di Jawa Barat terhadap pro dan kontra rancangan kebijakan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial di TikTok.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam hal teoritis maupun praktis nantinya. Adapun beberapa manfaat tersebut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai penunjang perkembangan kajian persepsi dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam pengembangan konsep komodifikasi reproduksi dan kebijakan publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti berikutnya yang membahas mengenai komodifikasi reproduksi dalam suatu rencana kebijakan publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pandangan dan respon Pasangan Usia Subur (PUS) di Jawa Barat terkait kebijakan publik yang berkembang di TikTok. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap implikasi sosial dari sebuah kebijakan.